

RINGKASAN

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEM-PENGARUHI PERILAKU GOLPUT (Muhammad Asfar, 1999, 53 halaman)

Penelitian ini didasarkan pada fenomena semakin meningkatnya jumlah pendukung Golput, termasuk meningkatnya jumlah suara yang tidak sah pada pemilu 1997. Oleh karena itu, beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimanakah karakteristik sosial ekonomi Golput, seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya; (2) sejauhmana tingkat kepercayaan politik pendukung Golput terhadap sistem politik yang ada; (3) faktor-faktor psikologis dan sosial-politis apakah yang mempengaruhi perilaku Golput?

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan karakteristik sosial ekonomi pendukung Golput dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Golput tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan pendukung Golput terhadap sistem politik Orde Baru.

Lokasi penelitian secara purposive ditetapkan di Kodya Surabaya dan Kodya Pasuruan, Jawa Timur. Populasi penelitian adalah para pendukung Golput di kedua lokasi penelitian. Sementara itu, sebanyak 50 responden akan dipilih sebagai sampel, dengan teknik *snow ball sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara langsung ke responden dengan menggunakan kuesioner yang telah terstruktur. Kedua, melakukan observasi langsung terhadap berbagai aktivitas

para pendukung Golput. Ketiga, melakukan studi pustaka ke instansi-instansi terkait seperti di kantor BPS, kantor Bagian Penerimaan Pemda Tk I Jatim maupun Pemda Tk II Kodya Surabaya dan Kodya pasuruan, beberapa lembaga penelitian, dan sebagainya. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan menarik berikut:

Pertama, para non-voter mempunyai karakteristik sosial ekonomi sebagai berikut: sebagian besar berpendidikan memadai; pekerjaannya relatif bervariasi, seperti pegawai negeri, pengusaha, aktivis LSM, dan petani; dan berpenghasilan cukup memadai atau bahkan lebih dari cukup.

Kedua, para *non-voter* yang diteliti kepercayaan politiknya sangat rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik Orde Baru tersebut adalah sebagai berikut: (1) tidak berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan rakyat, khususnya DPR/MPR; (2) tidak berfungsinya lembaga peradilan pada masa pemerintahan Orde Baru; (3) praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru; (4) praktek-praktek kebohongan dan inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru; dan (5) adanya berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru yang tidak kondusif bagi proses demokrasi di Indonesia.

Kedua, para *non-voter* yang diteliti menunjukkan tipe kepribadian yang toleran dan tidak otoriter. Sementara itu, dari sisi orientasi kepribadian, para *nonvoter* yang diteliti umumnya mempunyai orientasi kepribadian anomi, alienasi dan tidak apatis.

Ketiga, para *non-voter* yang diteliti mempunyai persepsi dan evaluasi kurang baik terhadap sistem politik dan pemilu Orde Baru. Sistem politik dan pemilu Orde Baru dinilai tidak atau kurang demokratis. Beberapa fakta yang

ditunjuk sebagai bukti tidak demokratisnya sistem politik dan pemilu Orde Baru adalah sebagai berikut: (1) besarnya peranan ABRI dalam sistem politik Orde Baru, baik dibidang politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan sebagainya; (2) perlemahan fungsi dan peran institusi-institusi demokrasi, seperti DPRD, DPR/MPR, partai politik, dan sebagainya; dan (3) tidak demokratisnya sistem dan pelaksanaan pemilu Orde Baru.

Keempat, faktor-faktor karakteristik sosial ekonomi, kepribadian atau psikologis, persepsi dan evaluasi terhadap sistem politik dan pemilu Orde Baru, dan kepercayaan politik *non-voter* mempengaruhi atau berhubungan dengan perilaku tidak memilih mereka.

Sementara itu, beberapa saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk meningkatkan peran serta para pemilih agar bersedia menggunakan haknya, dibutuhkan beberapa syarat berikut: pelaksanaan pemilu yang lebih jujur dan adil, penampilan pemerintah lebih demokratis, dan kenetralan pihak ABRI dan birokrasi terhadap berbagai OPP yang ikut bertarung.

Kedua, untuk meningkatkan suara pemilih juga dibutuhkan kerja keras dari partai politik, yakni partai-partai politik harus merubah orientasi kerjanya lebih ke arah memperjuangkan aspirasi rakyat. Disamping itu, partai politik harus berani melakukan kontrol dan kritik secara terbuka kepada pemerintah atau para penyelenggara negara.

Ketiga, secara akademis, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih berorientasi kepada penelitian survey, sehingga banyak kasus yang dijadikan sampel.

(LP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Kontrak Nomor: 069/P2IPT/DPPM/LITMUD/V/1998)